

ANALISIS KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS DI KAWASAN PERAIRAN NATUNA UTARA

Fajar Gunawan Afandi¹, Donny Yoesgiantoro², Lukman Yudho Prakoso³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: fajargunawan0afandi@gmail.com

Abstrak

Kawasan Laut Natuna Utara menyimpan banyak potensi sumber daya alam. Selain melimpahnya sumber daya alam berupa potensi perikanan yang ada di kawasan perairan tersebut, Laut Natuna Utara juga terkenal dengan potensi migasnya yang diperkirakan mencapai 127 barel. Cadangan minyak yang tersimpan di kawasan ini mencapai 14 juta barel, sedangkan untuk cadangan gas bumi mencapai 112 juta barel. Melimpahnya cadangan migas yang ada di kawasan ini mengakibatkan terjadinya ketertarikan beberapa negara untuk mengakui kawasan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari negara mereka. Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala keterbatasannya dinilai kurang siap dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut Natuna Utara baik dari segi militer, ekonomi, maupun politik. Oleh sebab itu, kemampuan dan kekuatan militer serta ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan kekuatan diplomasi serta daya tangkal yang mampu memberikan efek gentar kepada negara lain.

Kata Kunci: Natuna, Lingkungan keamanan strtaegis, keamanan

Abstract

The North Natuna Sea area holds a lot of potential for natural resources. In addition to the abundance of natural resources in the form of fishery potential in the water area, the North Natuna Sea is also famous for its oil and gas potential which is estimated to reach 127 barrels. The oil reserves stored in this region reached 14 million barrels, while the natural gas reserves reached 112 million barrels. The abundance of oil and gas reserves in this region has resulted in the interest of several countries to recognize the North Natuna Sea area as part of their country. Indonesia as a developing country with all its limitations is considered unprepared in facing the dynamics of the strategic environment in the North Natuna Sea region both in terms of military, economic, and political aspects. Therefore, Indonesia's military and economic capabilities and strength need to be improved so that it can increase the strength of diplomacy and deterrence that can have a trepidation effect on other countries.

Keywords: Natuna, Strtaegis security environment, security



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Natuna merupakan nama sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten yang berada di bagian paling utara dari kawasan selat karimata. Kawasan perairan di Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di bagian utara, Kabupaten Natuna bebatasan dengan laut Kamboja dan Vietnam, di bagian barat, berbatasan dengan laut Singapura dan Malaysia, dan di bagian timur, berbatasan dengan laut Malaysia Timur (SKPT Natuna). Dengan begitu, Laut Natuna Utara bersinggungan dengan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari dua negara ASEAN yaitu Malaysia dan Vietnam.

Laut Natuna Utara merupakan sebuah kawasan perairan dangkal dan sempit yang terletak di sebelah utara Kabupaten Natuna. Penamaan Laut Natuna Utara baru dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada 2017 sebagai bagian untuk memperjelas dan mempertahankan ZEE di Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara menjadi kawasan strategis karena tingginya dinamika lingkungan di perairan tersebut, karena kawasan Laut Natuna Utara merupakan wilayah lintas laut internasional yang berasal dari Asia Timur ke Asia Tenggara. Selain itu

padatnya lalu lintas laut pada kawasan ini, Laut Natuna Utara juga dapat dikatakan sebagai titik sentral dari Asia Tenggara.

Kawasan Laut Natuna Utara menyimpan banyak potensi sumber daya alam. Selain melimpahnya sumber daya alam berupa potensi perikanan yang ada di kawasan perairan tersebut, Laut Natuna Utara juga terkenal dengan potensi migasnya yang diperkirakan mencapai 127 barel (SKPT Natuna). Cadangan minyak yang tersimpan di kawasan ini mencapai 14 juta barel, sedangkan untuk cadangan gas bumi mencapai 112 juta barel. Melimpahnya cadangan migas yang ada di kawasan ini mengakibatkan terjadinya ketertarikan beberapa negara untuk mengakui kawasan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari negara mereka. Hal itu menyebabkan dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut Natuna Utara semakin memanas serta meningkatkan peluang ancaman di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan studi literatur dengan menggunakan metode system thinking dengan closed loop diagram.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Permasalahan batas wilayah suatu negara merupakan bagian dari permasalahan lingkungan strategis (Azmi, 2011). Lingkungan strategis merupakan suatu kawasan pada suatu negara yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman dari negara-negara disekitarnya (Dirjen Strahan & Dirjen Analisa Lingstra, 2008), dengan dilandaskan pada pemenuhan kepentingan nasional masing-masing negara. Peluang dan ancaman pada lingkungan strategis dapat terjadi dalam skala yang lebih besar maupun lebih kecil dan pada keadaan yang dinamis atau kacau sekalipun. Kondisi dari lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh sistem pertahanan suatu negara atau pun kondisi eksternal negara.

Pada dasarnya, lingkungan strategis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu immediate security (perbatasan negara), close security (regional) dan wide security (global) (Asep, 2021). Lingkungan strategis memuat banyak sekali isu terkait dengan tiga kategori tersebut, isu yang termasuk dalam ranah lingkungan strategis antara lain isu lingkungan Sustainable Finance Actiona Council (SFAC), perkembangan militer di negara sekitar kawasan, isu perbatasan, konflik intra dan antar negara, konflik kontemporer, adanya ancaman terkait senjata penghancur massa, perang Asymetrix, kemungkinan perang di masa depan, spionase, organisasi kejahatan transnasional, perubahan iklim, wilayah rentan bencana, keamanan pangan, lingkungan keamanan nasional, dan tantangan di masa depan. Sementara itu, dalam kajian lingkungan strategis satu negara, penting untuk memerhatikan lingkungan keamanan, baik itu dalam aspek militer, politik, ekonomi maupun sosial. Karena keamanan keempat aspek tersebut dapat menunjang postur pertahanan lingkungan strategis satu negara.

Isu perbatasan berupa sengketa wilayah di Kawasan Natuna merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melimpahnya potensi migas dan letak yang strategis menjadi alasan utama terjadinya sengketa wilayah di perairan Natuna, khususnya di Laut Natuna Utara. Sengketa wilayah yang terjadi saat ini pada dasarnya sudah dimulai sejak 1970-an. Laut Natuna Utara dulunya bernama Laut China Selatan yang akhirnya diganti pada tahun 2017 untuk memperjelas hak kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut (Poltak, 2013). Sengketa wilayah pada kawasan ini terjadi antara Indonesia dengan China yang disebabkan oleh klaim

China atas hampir 90% wilayah Laut China Selatan (Muflika, 2021) merupakan wilayah China yang dibatasi oleh nine dashed line dimana batas tersebut beririsan dengan ZEE Indonesia.

Selain potensi migas yang dimiliki oleh Natuna, letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan laut juga merupakan daya tarik bagi negara-negara asing untuk memperebutkan wilayah tersebut. Sir Walter Raleigh dalam teorinya mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, dengan kata lain menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya dapat menguasai dunia. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa jalur perdagangan laut merupakan suatu aspek penting dalam menunjang kekayaan suatu negara serta menjadi kekuatan penting untuk mempertahankan kedaulatan serta ekonomi suatu negara. Dalam kasus Natuna utara, klaim Pemerintah Tiongkok atas sebagian wilayah perairan Natuna Utara bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di Asia melalui penguasaan jalur perdagangan laut. Strategi geopolitik Tiongkok tidak boleh dibiarkan begitu saja karena telah menyinggung masalah kedaulatan serta kewilayahan NKRI.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia mengambil langkah untuk memebentuk Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) yang terletak di penjurus Nusantara. Kogabwilhan merupakan komando utama operasi markas besar TNI yang berada langsung dibawah komando Panglima TNI yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI yang ada di wilayah tersebut. Langkah Indonesia sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nicholas J. Spykman mengenai wawasan kombinasi. Teori ini mengkombinasikan kekuatan darat, laut, serta udara untuk menguasai daerah batas antar bangsa secara permanen dan abadi. Selain dari segi militer, peningkatan sisi geo-ekonomi didaerah Natuna juga perlu dilakukan untuk meningkatkan eksistensi serta kejelasan wilayah tersebut. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah Natuna, maka akan semakin jelas bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah kedaulatan NKRI.

Selain masalah sengketa wilayah, ketegangan di kawasan ini juga diwarnai oleh hadirnya Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan (Melita, 2018). Kehadiran AS beserta kapal-kapal perangnya semakin memperkeruh suasana di Laut China Selatan meskipun pihak AS berdalih bahwa alasan kehadiran mereka untuk mencari pesawat mereka yang hilang di perairan Laut China Selatan namun hal ini dapat dinilai sebagai ancaman bagi negara-negara sekitar mengingat tingginya frekuensi kehadiran AS di kawasan tersebut. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia harus mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk atas ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan antara AS dengan China.

Tingginya dinamika kawasan Laut Natuna Utara saat ini membawa Indonesia untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang baik dari segi militer, ekonomi, dan politik. Ketegangan antar dua kekuatan besar yang terjadi di wilayah Laut China Selatan juga merupakan potensi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

Pembahasan

Perkembangan lingkungan strategis Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis secara global maupun regional. Bidang pertahanan merupakan salah satu konteks perkembangan lingkungan strategis yang penting untuk diperhatikan. Bidang pertahanan menjadi penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu isu lingkungan strategis nasional dalam bidang pertahanan yang sedang berkembang saat ini adalah isu mengenai sengketa batas wilayah di lautan Natuna Utara antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Cina dan Malaysia. Lautan Natuna Utara merupakan suatu kawasan yang terbentang dari Selat Malaka hingga ke

Selat Taiwan. Kawasan ini menjadi daerah rawan konflik karena banyak negaranegara yang saling klaim atas kawasan tersebut, terlebih Pemerintah Tiongkok yang mengklaim sekitar 90% dari kawasan Laut China Selatan atau yang mereka sebut dengan nine dashline. Hal ini menimbulkan konflik dan tentangan dari negara-negara yang bersinggungan dengan nine dashline Pemerintah Tiongkok, salah satunya Indonesia.

Protes Indonesia terhadap klaim Pemerintah Tiongkok karena klaim tersebut beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini tentu menjadi penting karena berkaitan dengan keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi hal ini, mulai dari upaya diplomasi menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok, meningkatkan penjagaan di kawasan tersebut, hingga meluncurkan peta negara versi baru serta upaya penamaan Laut Natuna Utara. Namun upaya-upaya ini kerap mendapatkan protes dari Pemerintah Tiongkok seperti yang terjadi pada 2013, dimana Pemerintah Tiongkok mengirimkan nota protes yang berisi pelepasan kapalkapal penangkap ikan Tiongkok yang ditahan oleh pihak Indonesia. Kasus serupa juga terjadi pada 2016 dimana KRI Imam Bonjol berhadapan dengan 7 kapal penangkap ikan Tiongkok yang dikawal oleh coast guard di kawasan ZEE Indonesia.

Alasan Pemerintah Tiongkok atas kasus masuknya kapal mereka ke wilayah ZEE Indonesia didasarkan pada sejarah pada masa lalu. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa sejak dahulu kala wilayah tersebut merupakan wilayah tangkapan ikan masyarakat Tiongkok. Pernyataan tersebut tentu tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan Unclos 1982 yang menyatakan perairan Natuna Utara merupakan kawasan ZEE Indonesia (Melda, 2016). Berdasarkan Unclos 1982, Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi damai, yaitu dengan melayangkan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok yang berisi penolakan klaim Lautan Natuna Utara oleh Pemerintah Tiongkok yang didasarkan pada nine dashline dan pernyataan Indonesia bahwa Tiongkok telah melanggar ZEE. Selain itu, Indonesia juga mengambil langkah tegas seperti meningkatkan penjagaan di kawasan perairan Natuna Utara serta meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Namun segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seperti tidak mendapatkan respon berarti dari pihak Tiongkok.

Respon Pemerintah Tiongkok yang tetap berpegang teguh pada klaim nine dashline menunjukkan lemahnya diplomasi dan daya tangkal yang dimiliki oleh Indonesia. Diplomasi pemerintah Indonesia dapat dikatakan lemah karena Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan pihak Tiongkok dan sektor ekonomi Indonesia juga masih lemah dan sangat bergantung pada investor asing, salah satunya Tiongkok. Kelemahan ekonomi ini mengakibatkan kekhawatiran bagi Indonesia apabila bertindak terlalu jauh hingga menyebabkan embargo dari Tiongkok yang akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dari sisi militer juga Indonesia dinilai lemah dibandingkan dengan Tiongkok, sehingga pihak Tiongkok tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan militer Indonesia atau dengan kata lain daya tangkal yang dimiliki oleh Indonesia masih rendah. Selain isu Natuna Utara, isu lain yang menunjukkan lemahnya diplomasi Indonesia adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut saya kemampuan dan kekuatan Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan strategis masih lemah, khususnya pada sektor pertahanan militer dan ekonomi. Oleh sebab itu, kemampuan dan kekuatan militer serta ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan kekuatan diplomasi serta daya tangkal yang mampu memberikan efek gentar kepada negara lain. Upaya peningkatan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan kesungguhan Indonesia untuk mencapai kemandirian secara ekonomi. Kemandirian ini tentu memerlukan dukungan dari rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia

harus mampu meningkatkan daya saing dari produk dalam negeri sehingga produk-produk lokal tersebut mampu mendukung tercapainya kemandirian dibidang ekonomi. Selain itu, pembatasan investor asing dan pengembangan badan usaha lokal juga sangat penting karena mampu memberikan kemajuan signifikan bagi kemandirian ekonomi. Selain upaya peningkatan ekonomi, peningkatan alutsista juga sangat penting untuk meningkatkan daya tangkal Indonesia. Dengan daya tangkal yang kuat, negara lain akan merasa gentar untuk berbuat macam-macam terhadap keamanan maupun kedaulatan Indonesia. Peningkatan alutsista ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar cermat untuk melakukan peningkatan kekuatan alutsista baik dalam bentuk peremajaan maupun penambahan jumlah alutsista.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala keterbatasannya dinilai kurang siap dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut Natuna Utara baik dari segi militer, ekonomi, maupun politik. Oleh sebab itu, kemampuan dan kekuatan militer serta ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan kekuatan diplomasi serta daya tangkal yang mampu memberikan efek gentar kepada negara lain. Upaya peningkatan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan kesungguhan Indonesia untuk mencapai kemandirian secara ekonomi. Kemandirian ini tentu memerlukan dukungan dari rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing dari produk dalam negeri sehingga produk-produk lokal tersebut mampu mendukung tercapainya kemandirian dibidang ekonomi. Selain itu, pembatasan investor asing dan pengembangan badan usaha lokal juga sangat penting karena mampu memberikan kemajuan signifikan bagi kemandirian ekonomi. Selain upaya peningkatan ekonomi, peningkatan alutsista juga sangat penting untuk meningkatkan daya tangkal Indonesia. Dengan daya tangkal yang kuat, negara lain akan merasa gentar untuk berbuat macam-macam terhadap keamanan maupun kedaulatan Indonesia. Peningkatan alutsista ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar cermat untuk melakukan peningkatan kekuatan alutsista baik dalam bentuk peremajaan maupun penambahan jumlah alutsista.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Kamaluddin Nashir, Yugolastarob Komeini, Hesti Rosdiana. 2021. *Strategic Environment, Strategist, and Strategy*. Global Strategis, Th. 15, No. 1. Diakses di website: <https://www.e-journal.unair.ac.id/JGS/article/viewFile/21544/13723>
- Azmi. 2011. Kajian Arsip Wilayah Perbatasan Negara Dalam Rangka Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Terjaga Di Lingkungan Lembaga Negara Dan Pemerintahan Daerah. Diakses di webste: <https://anri.go.id/download/jurnal-vol.6anri122011-1571893573>
- Dirjen Strahan & Dirjen Analisa Lingstra. 2008. Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008. Diakses di website: <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/perkembangan-lingkungan-strategis.pdf>
- Melda Kamil Ariadno. 2016. Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses di website: <https://law.ui.ac.id/v3/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/>
- Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, Trilke Tulung. 2018. Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. Jurnal Eksekutif. Diakses di website: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20020>

- Muflika Nur Fuaddah. 2021. China Ngotot Klaim 90 Persen Wilayah Laut China Selatan hingga Bersengketa dengan Banyak Negara, Rupanya Ada Alasan Ini di Balikny. Diakses di website: <https://intisari.grid.id/read/032598067/china-ngotot-klaim-90-persen-wilayah-laut-china-selatan-hingga-bersengketa-dengan-banyak-negara-rupanya-ada-alasan-ini-di-baliknya?page=all>
- Poltak Partogi Nainggolan. 2013. Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia. Diakses di website: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf
- SKPT Natuna Kementrian Kelautan dan Perikanan, diakses di website: <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>